

Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto

Jumiati¹, Akbar^{2*}, Andi Khaeriyah³,
Ardi Rumallang⁴, Muh. Al Aswar Rusman⁵

^{1, 2, 4, 5} Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar

³ Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian,
Universitas Muhammadiyah Makassar

* akbar@unismuh.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat di Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan 40 peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat, pengurus kelompok tani, pemuda, perangkat kelurahan, dan kelompok wanita tani. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan, lokakarya perencanaan partisipatif, diskusi kelompok terarah, simulasi penyusunan rencana aksi komunitas, serta musyawarah restrukturisasi kelembagaan. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test pada enam indikator pengetahuan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata skor pengetahuan peserta dari 45 menjadi 78 pada skala 0-100. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pengetahuan tentang pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya lokal. Selain itu, kegiatan menghasilkan struktur kelembagaan masyarakat yang lebih jelas dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Kegiatan ini memperkuat partisipasi, kesadaran kolektif, dan kemampuan koordinasi masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat kelurahan. Program lanjutan perlu diarahkan pada pendampingan pengurus, penyusunan program kerja, dan pengembangan jejaring kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, serta sektor swasta.

Kata Kunci: *kelembagaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan komunitas, perencanaan partisipatif*

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menjamin kesejahteraan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (United Nations, 2015). Dalam konteks pembangunan lokal, keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dan keberadaan kelembagaan sosial yang kuat di tingkat akar rumput (Indarti, 2015; Rahmawati & Setyowati, 2021). Kelembagaan masyarakat berfungsi

sebagai wadah koordinasi, partisipasi, dan kolaborasi antara warga, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Hafid et al., 2016; Nugroho et al., 2022; Akbar et al., 2024; Jumiati et al., 2024a).

Kelurahan Monro-Monro, yang terletak di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, merupakan wilayah semi-perkotaan dengan penduduk sekitar 4.263 jiwa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro (BPS Kabupaten Jeneponto, 2024). Berdasarkan data kelurahan, terdapat 7 kelompok tani aktif, 3 kelompok usaha mikro, dan 2 organisasi sosial kemasyarakatan. Namun, sebagian besar kelompok ini masih menghadapi kendala serius dalam hal kapasitas manajerial, koordinasi kelembagaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lokal. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% anggota kelompok tani yang aktif mengikuti pertemuan rutin, dan sebagian besar belum memiliki rencana kerja yang terstruktur serta mekanisme koordinasi lintas kelompok.

Kelemahan tersebut menyebabkan banyak program pembangunan, baik dari pemerintah daerah maupun lembaga swadaya masyarakat, berjalan secara *top-down* tanpa melibatkan masyarakat secara optimal (Rohman et al., 2023; Hidayati & Sutrisno, 2020). Akibatnya, kegiatan pemberdayaan sering kali tidak berkelanjutan dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat di Monro-Monro, agar mampu mengelola potensi lokal, berkolaborasi secara efektif, dan menjalankan kegiatan ekonomi maupun sosial secara berkelanjutan (Ramdhani et al., 2016; Sari et al., 2020).

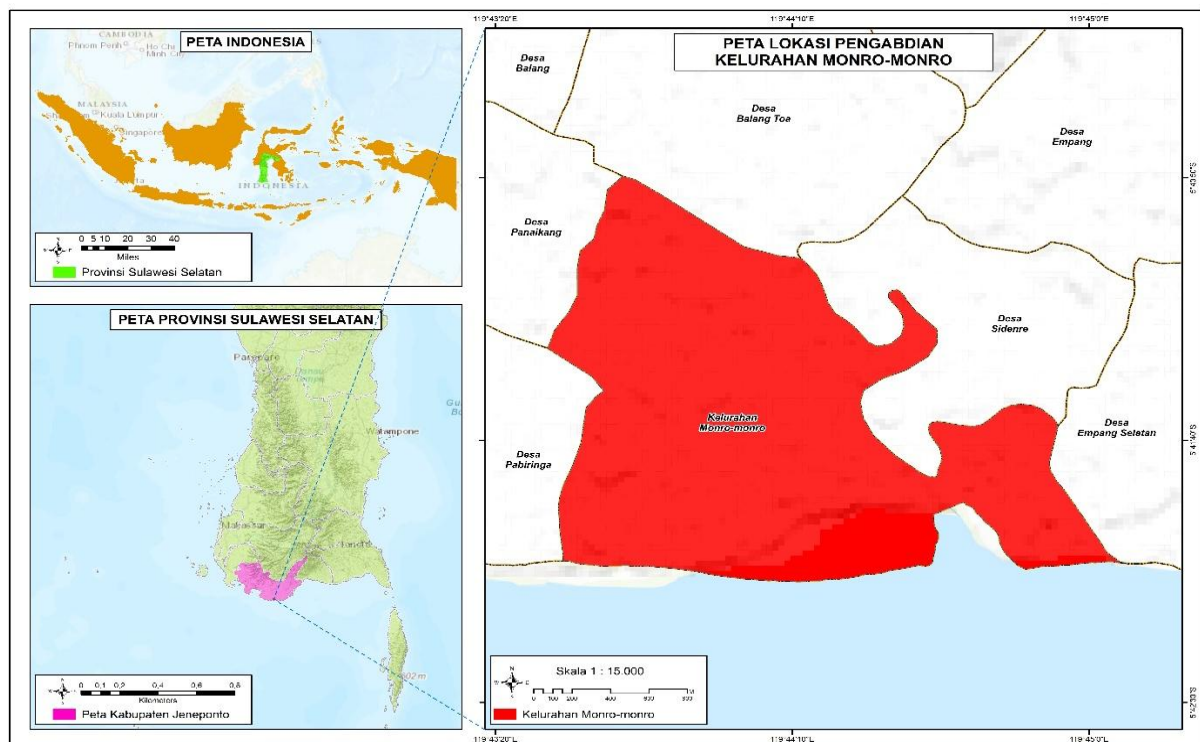
Untuk menjawab persoalan tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang dengan fokus pada penguatan kelembagaan masyarakat berbasis partisipasi lokal melalui tiga program utama, yaitu: (1) penyuluhan dan pendampingan manajemen organisasi serta kepemimpinan komunitas untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola kelompok tani, kelompok usaha, dan organisasi sosial; (2) fasilitasi lokakarya perencanaan partisipatif (Participatory Planning Workshop) untuk mendorong sinergi antara masyarakat, perangkat kelurahan, dan pemangku kepentingan lokal dalam merumuskan rencana pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat; serta (3) pendampingan restrukturisasi kelembagaan dan penyusunan rencana aksi komunitas berbasis potensi lokal.

Program penguatan kelembagaan ini dirancang berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menegaskan pentingnya tata kelola partisipatif dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam pembangunan lokal. Diartho (2017) menunjukkan bahwa kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dapat menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi apabila dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Ruhimat (2021) dan Suryana et al. (2023) membuktikan bahwa penguatan kelembagaan kelompok tani mampu meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, Asih (2025) menemukan bahwa faktor internal seperti kepemimpinan dan struktur organisasi yang kuat, serta faktor eksternal seperti dukungan pemerintah dan akses sumber daya, merupakan penentu keberhasilan kelembagaan lokal.

Pendekatan yang diusung dalam kegiatan ini juga merujuk pada model pemberdayaan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Nurzanah dan Arif (2023), yang mencakup dimensi penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Model ini memastikan bahwa proses pemberdayaan tidak berhenti pada tahap pelatihan, melainkan berlanjut pada tahap pembinaan, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan (Indahwati et al., 2023). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan kolaborasi antarkelompok, mendorong terbentuknya mekanisme koordinasi partisipatif antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, serta memperkuat keberlanjutan kelembagaan lokal melalui pembinaan dan fasilitasi kegiatan berbasis potensi sumber daya lokal. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi terbangunnya kelembagaan masyarakat yang tangguh dan partisipatif, terciptanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya serta kegiatan ekonomi berkelanjutan, dan terwujudnya model pemberdayaan kelembagaan lokal yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Balai Kelurahan Monro-Monro dan beberapa titik lapang yang digunakan untuk simulasi kegiatan. Peserta kegiatan berjumlah 40 orang yang dipilih secara purposif berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat, yaitu tokoh masyarakat, pengurus kelompok tani, pemuda, perangkat kelurahan, dan kelompok wanita tani. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, praktik langsung, dan berorientasi pada pemecahan masalah agar peserta dapat berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan.



Gambar 1. Peta Lokasi Pengabdian

Tahapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan observasi awal dan identifikasi permasalahan kelembagaan masyarakat. Selanjutnya dilakukan penyuluhan yang memuat materi tentang dasar-dasar kelembagaan, perencanaan partisipatif, manajemen organisasi sederhana, penggalan potensi sumber daya lokal, serta penyusunan rencana aksi komunitas. Metode yang digunakan meliputi ceramah singkat, studi kasus lokal, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*), dan simulasi penyusunan rencana. Setelah itu, dilakukan fasilitasi pembentukan atau restrukturisasi pengurus kelembagaan melalui musyawarah warga untuk menyepakati struktur organisasi, pembagian tugas, dan tata kerja kelembagaan. Tahap akhir berupa penyusunan rencana aksi komunitas yang berfokus pada isu prioritas di bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial. Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan kuesioner pre-test dan post-test yang mencakup enam indikator pengetahuan. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan skor sebelum dan sesudah kegiatan. Metode penyuluhan, pelatihan praktik, dan evaluasi menggunakan pendekatan pre-test dan post-test merupakan metode yang efektif dalam mengukur perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi keberhasilan kegiatan pengabdian (Jumiati et al., 2024b).

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto untuk membantu menyelesaikan permasalahan mitra terkait kapasitas kelembagaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim dosen pengabdian dengan melibatkan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa merupakan bentuk pembelajaran lapangan, khususnya dalam memahami dan membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Pembelajaran kontekstual ini diharapkan mampu mengasah kepekaan sosial mahasiswa sebagai cendekia di tengah isu-isu sosial yang berkembang. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan yang bersifat teoritis dan pendampingan yang bersifat praktis. Penyuluhan difokuskan pada pemberian materi tentang kelembagaan, perencanaan partisipatif, manajemen organisasi, penggalan potensi sumber daya lokal, strategi penguatan kelembagaan, serta penyusunan rencana aksi komunitas.

Pelaksanaan menghasilkan beberapa capaian utama yang meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas pengetahuan mengenai kelembagaan, serta terbentuknya struktur kelembagaan masyarakat yang lebih terorganisasi. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung secara partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi kelompok (*Focus Group Discussion/FGD*), simulasi perencanaan partisipatif, dan musyawarah pembentukan kelembagaan. Sebanyak 40 peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tingkat kehadiran mencapai 100%. Peserta terdiri atas unsur kelompok tani, kelompok wanita tani, pemuda, tokoh masyarakat, dan perangkat kelurahan yang berpartisipasi aktif dalam setiap sesi kegiatan.

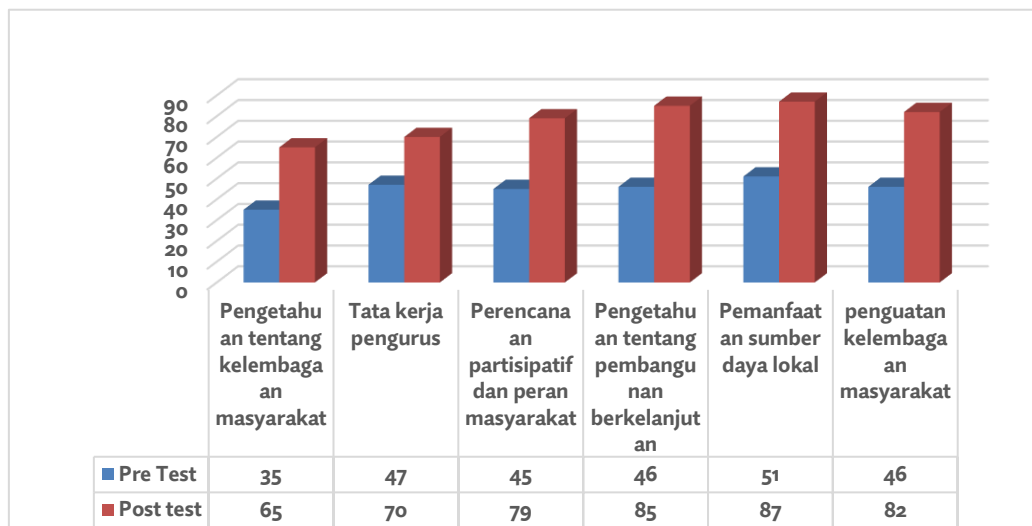
Partisipasi peserta terlihat dari antusiasme dalam menyampaikan pendapat, mengidentifikasi permasalahan kelembagaan yang dihadapi, serta merumuskan alternatif solusi melalui diskusi kelompok. Tingginya keterlibatan peserta menunjukkan bahwa

pendekatan partisipatif mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap program yang dilaksanakan.



Gambar 2. Pemberian dan Pendalaman Materi Penyuluhan

Dalam mengukur keberhasilan kegiatan penyuluhan tentang penguatan kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan digunakan enam indikator, yaitu pengetahuan tentang kelembagaan masyarakat, tata kerja pengurus, perencanaan partisipatif dan peran masyarakat, pengetahuan tentang pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya lokal, dan strategi penguatan kelembagaan. Indikator serta hasil pre-test dan post-test disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Hasil evaluasi tingkat pengetahuan masyarakat sebelum dan setelah penyuluhan

Hasil evaluasi kuantitatif menunjukkan peningkatan tingkat pemahaman peserta mengenai konsep dan praktik kelembagaan masyarakat. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, rata-rata skor pengetahuan meningkat dari 45 menjadi 78 pada skala 0-100. Peningkatan skor terbesar terjadi pada aspek pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya lokal. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang menggabungkan ceramah interaktif, studi kasus lokal, diskusi kelompok, dan simulasi mampu memperkuat pengetahuan konseptual sekaligus

kemampuan praktis peserta. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga membangun kapasitas berpikir kritis dan kolaboratif di antara peserta.

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami dan mengelola kelembagaan lokal. Tingginya kehadiran dan keterlibatan peserta mengindikasikan kebutuhan nyata terhadap organisasi yang mampu menjadi wadah koordinasi pembangunan di tingkat kelurahan. Temuan ini sejalan dengan Amin et al. (2019) dan prinsip tata kelola kolaboratif yang menekankan pelibatan berbagai aktor dalam pengambilan keputusan (Emerson et al., 2012). Hal ini juga mendukung Jumiati et al. (2022) bahwa penyuluhan dan pendampingan mampu meningkatkan antusiasme kelompok tani dalam memahami strategi pengembangan usaha dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Menurut United Nations (2015), pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Peningkatan rata-rata nilai pengetahuan dari 45 menjadi 78 menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang memadukan ceramah interaktif, studi kasus lokal, diskusi kelompok, dan simulasi mampu meningkatkan pemahaman peserta secara efektif. Hasil ini mendukung pendapat Kurniawan et al. (2022) yang menyatakan bahwa penguatan kelembagaan merupakan proses pembelajaran sosial yang berkelanjutan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain meningkatkan aspek pengetahuan, kegiatan ini juga menghasilkan perubahan organisasi melalui terbentuknya struktur kelembagaan yang lebih jelas. Struktur tersebut memuat pembagian peran pengurus dan tata kerja yang disepakati melalui musyawarah warga sehingga mampu memperkuat koordinasi antarkelompok serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan lokal. Hal ini sesuai dengan Diartho (2017) dan prinsip tata kelola polisentris yang menekankan pentingnya pembagian peran dalam pengelolaan sumber daya bersama (Ostrom, 2010).

Dari sisi sosial, proses musyawarah yang dilakukan berhasil membangun komunikasi dan kolaborasi di antara berbagai unsur masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok wanita tani, pemuda, dan pemerintah kelurahan. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan modal sosial (*social capital*) berupa kepercayaan, kerja sama, dan komitmen bersama dalam mengelola kelembagaan lokal. Menurut Yuliani et al. (2023), modal sosial dan kepemimpinan partisipatif merupakan faktor utama yang menentukan efektivitas kelembagaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kelurahan Monro-Monro. Pertama, peserta memperoleh peningkatan pengetahuan mengenai fungsi, tata kelola, dan mekanisme kerja kelembagaan sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengorganisasi kegiatan masyarakat. Kedua, terbentuknya struktur kelembagaan baru memberikan wadah koordinasi yang lebih jelas untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara partisipatif. Ketiga, kegiatan ini meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan musyawarah, menyusun rencana kerja, serta mengambil keputusan secara kolektif sehingga diharapkan mampu

memperkuat kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lokal.

Selain manfaat tersebut, pemerintah kelurahan juga memperoleh mitra kelembagaan yang lebih terstruktur sehingga proses koordinasi program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih efektif. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan yang mendukung keberlanjutan pembangunan di tingkat komunitas. Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan melalui pendekatan partisipatif berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat, kapasitas pengetahuan, serta tata kelola organisasi lokal. Keberhasilan tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara kolaboratif dapat menjadi strategi yang efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai mitra kegiatan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Monro-Monro berhasil memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat melalui penyuluhan, diskusi kelompok, simulasi perencanaan partisipatif, dan musyawarah restrukturisasi kelembagaan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata skor pengetahuan peserta dari 45 menjadi 78 pada skala 0-100. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya struktur kelembagaan masyarakat yang lebih jelas serta meningkatkan kemampuan peserta dalam berkolaborasi, menyusun rencana kerja, dan mengambil keputusan secara kolektif. Pendekatan partisipatif terbukti relevan untuk memperkuat modal sosial dan kapasitas organisasi masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat kelurahan. Kegiatan lanjutan disarankan berfokus pada pendampingan pengurus, penyusunan program kerja kelembagaan, penguatan jejaring kemitraan, serta monitoring dan evaluasi berkala agar kelembagaan yang terbentuk dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Makassar, Pemerintah Kelurahan Monro-Monro, masyarakat peserta kegiatan, serta mahasiswa yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Dukungan dan partisipasi seluruh pihak berperan penting dalam keberhasilan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat di Kelurahan Monro-Monro.

Referensi

Akbar, A., Jumiati, & Rumallang, A. (2024). Sustainability of agribusiness institutions (Case study on horticultural agribusiness farmer groups in Bantaeng Regency). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1302(1), 012123. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1302/1/012123>

- Amin, A., Isril, I., & Febrina, R. (2019). Penguatan kelembagaan berbasis masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(2), 145–156.
- Asih, N. (2025). Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan lokal. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 25–38.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto. (2024). Kabupaten Jeneponto dalam angka 2024. BPS Kabupaten Jeneponto.
- Diartio, H. C. (2017). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 17(1), 1–12.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/muro11>
- Hafid, A., Syahyuti, S., & Wahyuni, S. (2016). Kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 14(2), 95–108.
- Hidayati, S., & Sutrisno, A. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 145–154.
- Indahwati, N., Prasetyo, B., & Kurniawan, R. (2023). Model pemberdayaan masyarakat berbasis pendampingan berkelanjutan. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(2), 87–96.
- Indarti, D. (2015). Penguatan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–56.
- Jumiati, Akbar, Agusanty, H., Kasri, A., Adri, A., & Saleh, M. (2024a). Local institutional strengthening in sustainable lake fisheries resources management system (Case study of Tempe Lake, Wajo Regency, South Sulawesi, Indonesia). *Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries*, 28(5), 717–730.
- Jumiati, J., Hasriani, H., Badollahi, I., Molla, S., Wahyuni, S., & Syam, A. (2024b). Pelatihan pengolahan cabai dan pemasaran digital pada Kelompok Wanita Bunga Intang dan IMM Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. *Madaniya*, 5(3), 958–968. <https://doi.org/10.53696/27214834.860>
- Jumiati, J., Sahlan, S., & Akbar, A. (2022). Penyuluhan dan pendampingan pemasaran petani di era new normal Covid-19 di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. *Madaniya*, 3(1), 47–53. <https://doi.org/10.53696/27214834.133>
- Kurniawan, A., Rahman, M., & Yusuf, I. (2022). Penguatan kelembagaan masyarakat sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 18(2), 110–121.
- Nurzanah, N., & Arif, M. (2023). Model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan melalui pendekatan kelembagaan. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 8(1), 32–44.
- Nugroho, D., Prasetyo, H., & Widodo, S. (2022). Collaborative governance dalam penguatan kelembagaan masyarakat desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 76–88.
- Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. *American Economic Review*, 100(3), 641–672. <https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641>
- Rahmawati, R., & Setyowati, E. (2021). Peran kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(2), 101–112.

- Ramdhani, R., Suryadi, D., & Mulyana, A. (2016). Kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan berbasis komunitas. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 9(1), 56–67.
- Rohman, A., Hidayat, T., & Sari, N. (2023). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penguatan kelembagaan masyarakat. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 55–66.
- Ruhimat, I. S. (2021). Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam pengelolaan agroforestry berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 18(2), 113–126.
- Sari, M., Prabowo, H., & Lestari, D. (2020). Strategi penguatan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Penyuluhan*, 16(2), 189–201.
- Suryana, A., Ridwan, R., & Kurnia, F. (2023). Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 11(1), 15–27.
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Yuliani, D., Firmansyah, R., & Putri, A. (2023). Modal sosial dan kepemimpinan partisipatif dalam penguatan kelembagaan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(2), 134–147.